

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Umum Subyek Penelitian

Pada bagian ini, peneliti akan memaparkan deskripsi umum mengenai profil dua media daring yang menjadi objek kajian, yakni Kompas.com dan Konde.co. Informasi yang disajikan diperoleh dari laman resmi masing-masing media, serta dilengkapi dengan referensi lain yang terpercaya dan relevan untuk mendukung keakuratan data.

4.1.1 Kompas.com



Gambar 4.1 Logo Kompas.com (Kompas.com, 2025)

Kompas.com merupakan situs berita daring yang berada di bawah pengelolaan PT Kompas Cyber Media, anak perusahaan dari PT Kompas Media Nusantara, penerbit surat kabar Harian Kompas (Kompas.com, 2025). Kompas.com dikenal memiliki warisan jurnalistik dari media cetak dengan nilai-nilai humanisme yang diwariskan oleh pendirinya, Jakob Oetama Nugroho dalam (Pitri, 2023). Kompas.com sebagai sumber berita terkemuka dapat menyajikan pemberitaan yang mendalam mengenai dampak negatif kekerasan berbasis gender khususnya yang dialami oleh pekerja perempuan, serta pentingnya menciptakan lingkungan kerja yang aman bagi perempuan. Kompas.com adalah surat kabar nasional terbesar yang memiliki pengaruh signifikan dalam membentuk opini publik serta berfungsi sebagai situs berita umum (Santibeng, 2023).

Kompas.com menelusuri fakta dengan menggali informasi dari narasumber yang dapat dipercaya (Aulia, 2022). Para wartawan memastikan bahwa sumber

yang dikutip adalah saksi langsung dari suatu peristiwa, sementara informasi dari sumber sekunder atau tersier ditelaah dengan kritis. Selain itu, setiap pernyataan narasumber harus diverifikasi kembali dengan pihak-pihak terkait guna memastikan keakuratan dan objektivitas. Pada fenomena ini, dibutuhkan pendekatan jurnalistik yang mengutamakan kredibilitas sumber, verifikasi berlapis, serta skeptisisme terhadap informasi yang belum diverifikasi untuk memastikan bahwa pengalaman korban terdokumentasi dengan akurat dan mendapatkan perhatian yang layak.

Kompas.com ikut serta memberitakan kasus kekerasan, terutama kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja, khususnya yang dialami oleh pekerja perempuan. Komitmen ini tercermin dari dua penghargaan bergengsi yang diraih, yaitu Harian Kompas telah berhasil memperoleh penghargaan Swara Sarasvati pada tahun 2010 dan Dian Award pada tahun 2012. Swara Sarasvati merupakan penghargaan yang diberikan oleh Koalisi Perempuan Indonesia (KPI) kepada Kompas.com atas kontribusinya dalam mendukung kampanye peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, Kompas.com juga menerima Dian Award dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), sebagai bentuk apresiasi atas pemberitaannya yang dianggap mampu memberikan inspirasi bagi perempuan (Saum, 2016).

4.1.2 Konde.co



Gambar 4.2 Logo Konde.co (Konde.co, 2025)

Konde.co merupakan media alternatif yang secara khusus mengangkat isu-isu terkait perempuan, kesetaraan gender, dan hak asasi manusia sebagai fokus utama pemberitaannya. Di sisi lain, Konde.co memiliki pendekatan jurnalisme advokasi yang menyoroti ketidakadilan gender dan hak-hak perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Salah satu kekhasan dari pemberitaannya adalah

pendekatan melalui perspektif perempuan dan kelompok marginal. Dimana, dalam setiap pemberitaannya Konde.co tidak hanya sekedar memberikan informasi melainkan juga memberikan ruang bagi para pekerja yang mengalami masalah kekerasan gender.

Konde.co secara konsisten mengangkat isu-isu kemanusiaan terkait perempuan, termasuk permasalahan kelompok marginal, ketidakadilan gender, tindak kekerasan, serta berbagai bentuk stigma negatif. Keunggulan Konde.co terletak pada pendekatan jurnalistiknya yang kritis dan edukatif, menawarkan sudut pandang berbeda dalam memahami isu-isu kesetaraan serta hak-hak kelompok terpinggirkan. Konde.co juga aktif berkolaborasi dengan Komnas Perempuan dalam upaya melawan narasi diskriminatif dan memperjuangkan kebebasan berekspresi bagi perempuan (Lastamimi, 2022). Capaian Konde.co diakui melalui sejumlah penghargaan, antara lain apresiasi dari Komnas Perempuan atas inisiatifnya menciptakan ruang aman bagi korban kekerasan (2024) serta nominasi AMSI Award untuk kampanye digital #Metoo (2024) (Konde, 2025).

4.2 Hasil dan Pembahasan

Penelitian ini menyajikan hasil dan pembahasan melalui analisis terhadap 10 artikel berita yang dipublikasikan oleh Kompas.com, kemudian dilanjutkan dengan menganalisis 10 artikel berita lainnya yang diterbitkan oleh Konde.co. Proses analisis dilakukan dengan menggunakan kerangka framing yang dikembangkan oleh Entman. Oleh karena itu, sebelum memasuki tahap analisis, disampaikan terlebih dahulu uraian singkat mengenai masing-masing artikel yang akan dianalisis berdasarkan elemen-elemen dalam teori Framing oleh Robert N. Entman.

4.2.1 Analisis Framing Berita di Kompas.com

1. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

a. Artikel Berita 1

Judul : Polisi Selidiki Kasus ART yang Diduga Tak Dikasih Makan dan Dikurung Majikan di Jakarta Barat

Sumbe : Kompas.com

Tanggal : 15 Februari 2024

Ringkasan: Berita tersebut berisi tentang Polres Metro Jakarta Barat yang sedang menyelidiki dugaan kasus penyiksaan terhadap seorang asisten rumah tangga bernama Isabela Elu (20), yang diduga dikurung dan tidak diberi makan oleh majikannya di wilayah Jakarta Barat, setelah video kondisinya yang memprihatinkan viral di media sosial.

Tabel 4.1 Analisis Artikel Berita 1 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Polres Metro Jakarta Barat tengah menyelidiki kasus asisten rumah tangga (ART) yang dikurung dan tak diberi makan oleh majikan di Jakarta Barat
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Majikan sebagai pelaku kekerasan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Perilaku pelaku tidak manusiawi dan tidak bermoral
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kasus dibawa ke jalur hukum dalam upaya penyelesaian masalah yang dialami oleh asisten rumah tangga (ART) tersebut.

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Berdasarkan elemen *define problem*, Kompas.com mbingkai permasalahan dengan menyoroti langkah Polres Metro Jakarta Barat yang sedang melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dialami oleh seorang asisten rumah tangga (ART) bernama Isabela Elu. Isabela diduga

mengalami perlakuan tidak manusiawi dari majikannya berupa tidak diberi makan dan dikurung di wilayah Jakarta Barat. Fokus permasalahan ini tampak jelas dari judul berita, serta diperkuat dengan beredarnya video yang memperlihatkan kondisi Isabela tampak sangat kurus saat mencoba memanjat tembok, yang diunggah oleh rekannya sesama ART.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi majikan sebagai pihak yang menjadi sumber masalah dalam kasus ini. Hal tersebut merujuk pada pendefinisian masalah sebelumnya, di mana majikan diduga melakukan tindakan kekerasan terhadap Isabela Elu. Penegasan ini diperkuat melalui penyebaran video viral yang memperlihatkan Isabela dalam kondisi tubuh yang sangat kurus sedang memanjat tembok, diduga akibat dikurung dan tidak diberi makan oleh majikannya.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com memberikan penilaian moral terhadap tindakan pelaku sebagai perilaku yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian ini didasarkan pada kondisi fisik korban yang sangat memprihatinkan, yang diduga merupakan akibat dari perlakuan kejam berupa pengurungan dan tidak diberi makan oleh majikannya.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com merekomendasikan penyelesaian masalah melalui jalur hukum, yang tercermin dari informasi bahwa pihak kepolisian tengah melakukan penyelidikan terhadap kasus yang dialami oleh asisten rumah tangga (ART) tersebut.

2. **Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)**

b. **Artikel Berita 2**

Judul : Diduga Mengalami Kekerasan, 5 ART Kabur dari Rumah Majikan di Jatinegara Lewati Pagar Berkawat

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 14 Februari 2024

Ringkasan: Berita tersebut berisi tentang lima asisten rumah tangga dilaporkan melarikan diri dari rumah majikannya di Jatinegara, Jakarta Timur, karena diduga mengalami kekerasan fisik, termasuk pemukulan dan penyetrakaan, hingga menyebabkan luka-luka; kasus ini telah dilaporkan dan ditangani oleh Polres Metro Jakarta Timur untuk proses penyelidikan lebih lanjut.

Tabel 4.2 Analisis Artikel Berita 2 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Lima asisten rumah tangga (ART) Kabur dari rumah majikan melewati pagar berkawat di Jatinegara
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Dugaan aniaya yang dilakukan oleh majikan terhadap ke-lima asisten rumah tangga (ART)
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan aniaya dinilai tidak manusiawi
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Vina (saksi mata) melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian atas dugaan penganiayaan terhadap lima asisten rumah tangga (ART)

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Pada elemen *define problem*, Kompas.com membingkai masalah dengan menyoroti peristiwa lima asisten rumah tangga (ART) yang melarikan diri dari rumah majikannya dengan memanjat pagar kawat di kawasan Jatinegara. Fokus isu ini tergambar jelas dalam judul berita, serta diperkuat oleh kesaksian seorang pegawai kantor yang mengaku melihat keributan terjadi di depan kantornya saat peristiwa itu berlangsung.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi dugaan penganiayaan oleh majikan sebagai akar permasalahan yang mendorong lima asisten rumah tangga (ART) melarikan diri. Penjelasan ini diperkuat oleh kesaksian seorang pegawai kantor bernama Vina, yang mendengar

langsung pengakuan dari tiga korban saat mereka mencoba kabur dengan memanjat pagar berkawat.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com memosisikan tindakan kekerasan yang diduga dilakukan oleh majikan terhadap para ART sebagai perbuatan yang tidak manusiawi dan bertentangan dengan norma etika. Penilaian ini didukung oleh keterangan saksi mata yang sempat berbicara langsung dengan korban, di mana korban mengaku melarikan diri karena sering mengalami penyiksaan dari majikannya.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menyarankan penyelesaian melalui jalur hukum, yang terlihat dari tindakan Vina selaku saksi mata yang melaporkan dugaan penganiayaan terhadap lima asisten rumah tangga (ART) tersebut kepada pihak kepolisian.

3. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

c. Artikel Berita 3

Judul : Ketua KPU Diadukan Lagi ke DKPP, Diduga Goda Anggota PPLN

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 18 Februari 2024

Ringkasan: Ketua KPU RI, Hasyim Asy'ari, dilaporkan ke DKPP pada 18 April 2024 atas dugaan penyalahgunaan relasi kuasa dalam membina hubungan personal dan melakukan tindakan asusila terhadap anggota PPLN di Eropa. Hubungan tersebut berlangsung sejak Agustus 2023 dalam konteks kedinasan. Korban mengalami tekanan psikologis hingga mengundurkan diri sebelum Pemilu 2024. Kuasa hukum menyatakan telah mengantongi bukti kuat dan mempertimbangkan pelaporan ke kepolisian. Kasus ini dinilai sebagai pengulangan pelanggaran etika oleh Hasyim,

sehingga dimohonkan sanksi pemberhentian permanen dari jabatannya.

Tabel 4.3 Analisis Artikel Berita 3 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari kembali diadakan ke DKPP atas dugaan menggoda anggota PPLN
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Tindakan ketua KPU Hasyim Asy'ari atas penyalahgunaan kekuasaan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pentingnya menjaga nafsu untuk kepuasan pribadi
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pentingnya menjaga nafsu untuk kepuasan pribadi

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Pada elemen *define problem*, Kompas.com membingkai persoalan dengan menyoroti pelaporan Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) atas dugaan tindakan tidak pantas terhadap anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN). Isu ini terlihat jelas dalam judul berita dan diperkuat melalui pernyataan kuasa hukum Aristo, yang menyebut telah mengumpulkan berbagai bukti untuk mendukung laporan tersebut.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari sebagai akar permasalahan. Hal ini didukung oleh pernyataan Aristo selaku kuasa hukum pelapor, yang menuduh Hasyim memanfaatkan posisi dan relasi kuasanya untuk mendekati anggota PPLN dengan tujuan pribadi yang bersifat romantis dan tidak profesional.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com menyoroti pentingnya etika dalam menjaga integritas jabatan publik, khususnya dalam

mengendalikan kepentingan pribadi yang bersifat emosional atau seksual. Penilaian moral ini diperkuat oleh pernyataan kuasa hukum Aristo, yang menyebut bahwa tindakan Ketua KPU Hasyim Asy'ari telah menimbulkan dampak psikologis serius bagi korban, termasuk trauma mendalam terhadap laki-laki.

4. Treatment Recommendation

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menampilkan penyelesaian melalui jalur hukum sebagai langkah yang dianggap tepat. Hal ini ditunjukkan dengan pernyataan dari kuasa hukum korban yang menegaskan pentingnya proses hukum terhadap Ketua KPU Hasyim Asy'ari, mengingat sebelumnya tidak ada sanksi tegas yang diberikan atas dugaan pelanggaran serupa.

4. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

d. Artikel Berita 4

Judul : Kronologi Skandal Asusila Penyebab Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 4 Juli 2024

Ringkasan: Ketua KPU Hasyim Asy'ari diberhentikan oleh DKPP karena terbukti melakukan tindak asusila terhadap anggota PPLN Den Haag, CAT. Ia memanfaatkan relasi kuasa untuk merayu, memaksa berhubungan badan, dan menjanjikan pernikahan yang tak ditepati. Hasyim juga menyalahgunakan fasilitas negara untuk kepentingan pribadi. DKPP menyatakan perilakunya melanggar kode etik berat dan tidak mencerminkan integritas penyelenggara pemilu.

Tabel 4.4 Analisis Artikel Berita 4 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari resmi dipecat dari jabatannya oleh DKPP

<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Hasyim Asy'ari terbukti melanggar kode etik sebagai penyelenggara pemilu atas dugaan tindakan asusila
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Perbuatan Hasyim telah melanggar berbagai nilai kemanusiaan
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	DKPP meminta Presiden untuk segera menindaklanjuti putusan tersebut

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Berdasarkan elemen *define problem*, Kompas.com memandang permasalahan utama dalam pemberitaan ini adalah keputusan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang memberhentikan Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari dari jabatannya. Hal ini tergambar dari judul berita dan diperkuat dengan pernyataan Ketua DKPP Heddy Lugito yang menyatakan bahwa seluruh dalil pengaduan korban terkait pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu telah diterima sepenuhnya.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi akar permasalahan sebagai pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dalam kapasitasnya sebagai penyelenggara pemilu. Dugaan pelanggaran ini diperkuat melalui pernyataan kuasa hukum korban, Aristo, yang mengungkap bahwa Hasyim secara berulang mendekati korban dengan tujuan membangun relasi romantis demi kepentingan pribadi.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com menilai bahwa tindakan Hasyim Asy'ari merupakan bentuk pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Penilaian ini diperkuat oleh pernyataan kuasa hukum korban yang menyebut bahwa Hasyim tidak hanya mendekati korban, tetapi juga memaksa korban untuk melakukan tindakan asusila.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menyampaikan bahwa penyelesaian kasus ini diarahkan melalui jalur hukum, dengan Ketua

DKPP Heddy Lugito yang mendesak Presiden Joko Widodo agar segera menindaklanjuti keputusan pemecatan terhadap Hasyim Asy'ari.

5. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

e. Artikel Berita 5

Judul : Erick Thohir Kutuk Keras Pelecehan Mahasiswi yang Magang di BUMN

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 22 November 2024

Ringkasan: Kementerian BUMN menegaskan komitmennya terhadap lingkungan kerja bebas pelecehan melalui kebijakan *Respectful Workplace Policy* (RWP). Pernyataan ini menyusul laporan mahasiswi magang berinisial H atas dugaan pelecehan seksual oleh pejabat BUMN di Semarang. Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk keras tindakan tersebut, mendukung proses hukum, dan siap memberi pendampingan kepada korban.

Tabel 4.5 Analisis Artikel Berita 5 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Tindakan pelecehan seksual oleh seorang pejabat BUMN terhadap mahasiswi magang di Semarang
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pelecehan yang dilakukan terjadi atas penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh pejabat BUMN
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Menteri BUMN Erick Thohir mengutuk keras tindakan pelecehan seksual
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Komitmen BUMN dalam memberikan sanksi tegas kepada pelaku

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Pada bagian *define problem*, Kompas.com memaknai inti persoalan sebagai dugaan pelecehan seksual yang dilakukan oleh seorang pejabat BUMN terhadap mahasiswi magang di kantor BUMN yang berlokasi di Semarang. Permasalahan ini ditampilkan melalui isi artikel yang menyebut bahwa mahasiswi tersebut telah melaporkan kejadian tersebut ke Polrestabes Semarang.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Kompas.com menyoroti akar permasalahan sebagai tindakan pelecehan seksual yang terjadi di lingkungan kantor BUMN, yang diduga kuat terjadi karena penyalahgunaan wewenang oleh pelaku. Hal ini dikuatkan oleh kesaksian korban yang mengaku dipanggil ke ruang kerja oleh pejabat tersebut dengan alasan perkenalan, namun kemudian mengalami perlakuan yang tidak senonoh,

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com menekankan sikap tegas Menteri BUMN Erick Thohir yang mengutuk keras tindakan pelecehan seksual tersebut. Penegasan ini sejalan dengan kebijakan internal Kementerian BUMN yang berkomitmen menciptakan lingkungan kerja yang aman serta mencegah segala bentuk kekerasan dan pelecehan di tempat kerja.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menggarisbawahi langkah penyelesaian melalui jalur hukum yang diambil oleh pihak BUMN, termasuk komitmen untuk memberikan sanksi tegas kepada pelaku, menyediakan pendampingan bagi korban, serta memperkuat implementasi kebijakan Respectful Workplace Policy (RWP) yang telah diberlakukan sejak tahun 2022 oleh Kementerian BUMN guna menciptakan lingkungan kerja yang aman dan bebas dari kekerasan.

6. **Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)**

f. **Artikel Berita 6**

Judul : Komnas Perempuan: 34.682 Perempuan Menjadi Korban Kekerasan Sepanjang 2024

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 13 Agustus 2024

Ringkasan: Sepanjang tahun 2024, Komnas Perempuan mencatat sebanyak 34.682 perempuan menjadi korban kekerasan, berdasarkan data gabungan dengan Kementerian PPPA dan Forum Pengadaan Layanan (FPL). Kekerasan seksual mendominasi dengan 15.621 kasus, diikuti kekerasan psikis (12.878 kasus) dan fisik (11.099 kasus), sementara jenis kekerasan lainnya mencapai 6.897 kasus. Ketua Komnas Perempuan, Andy, menyatakan bahwa angka ini masih mencerminkan fenomena gunung es dan menekankan pentingnya data sebagai dasar pembentukan kebijakan, seperti Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, guna mendorong kesadaran dan solusi terhadap kekerasan terhadap perempuan.

Tabel 4.6 Analisis Artikel Berita 6 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan sepanjang tahun 2024
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Lemahnya perlindungan terhadap perempuan serta kurangnya kesadaran masyarakat
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Kekerasan terhadap perempuan tidak dapat ditoleransi
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pentingnya pemanfaatan data untuk mendorong perubahan kebijakan dan perilaku sosial

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam elemen *define problem*, Kompas.com membingkai permasalahan pada meningkatnya angka kekerasan terhadap perempuan selama tahun

2024. Framing ini terlihat dari penekanan pada data yang disampaikan oleh Ketua Komnas Perempuan, Andy Yentriyani, yang mengungkapkan bahwa terdapat 34.682 perempuan yang menjadi korban kekerasan sepanjang tahun tersebut. Data tersebut diposisikan sebagai sorotan utama untuk menunjukkan urgensi persoalan kekerasan berbasis gender di Indonesia.

2. ***Diagnosis Causes***

Dalam elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi akar permasalahan dari tingginya angka kekerasan terhadap perempuan sebagai akibat dari lemahnya sistem perlindungan hukum dan rendahnya kesadaran masyarakat terhadap isu tersebut. Framing ini diperkuat oleh pernyataan Andy Yentriyani yang menyebut bahwa data yang tercatat hanya menggambarkan puncak dari fenomena gunung es, mengindikasikan masih banyaknya kasus yang belum terungkap atau dilaporkan. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa persoalan struktural dan budaya menjadi penyebab utama yang perlu ditangani melalui perubahan kebijakan dan peningkatan kesadaran publik.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com membingkai kekerasan terhadap perempuan sebagai bentuk pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia yang tidak dapat ditoleransi. Penilaian moral ini ditunjukkan melalui kutipan pernyataan Andy Yentriyani yang menegaskan bahwa data kekerasan seharusnya menjadi landasan penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap urgensi penanganan isu ini. Dengan demikian, media memosisikan tindakan kekerasan berbasis gender sebagai persoalan yang bertentangan dengan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menekankan pentingnya pemanfaatan data sebagai dasar untuk mendorong perubahan kebijakan serta perilaku sosial masyarakat. Media juga menyoroti urgensi penguatan regulasi, salah satunya melalui kehadiran Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang dijadikan contoh konkret

bagaimana data dapat digunakan untuk membentuk kebijakan yang berpihak pada korban kekerasan berbasis gender. Pendekatan ini menunjukkan bahwa penyelesaian yang ditawarkan tidak hanya bersifat reaktif, tetapi juga strategis dan berorientasi pada perubahan sistemik.

7. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

g. Artikel Berita 7

Judul : Karyawan di Jakarta Pusat Mengaku Jadi Korban Kekerasan Atasannya Sejak 2022

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 13 September 2024

Ringkasan: Seorang karyawan berinisial (CS), mengaku menjadi korban kekerasan oleh atasannya sesama perempuan, C (43), sejak 2022. Ia mengalami kekerasan fisik, verbal, psikis, hingga pelecehan seksual, dengan insiden terparah terjadi pada 2024. Kekerasan termasuk pemaksaan menyakiti diri sendiri dan pemukulan yang disaksikan rekan kerja. Kasus ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, dan CS berharap segera ada tindakan hukum.

Tabel 4.7 Analisis Artikel Berita 7 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang karyawan mengaku menjadi korban kekerasan atasannya sejak tahun 2022 hingga 2024
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kekerasan terjadi atas dasar relasi kuasa
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindak kekerasan tersebut dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	CS sebagai korban membawa kasus ini ke jalur hukum

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Pada elemen *define problem*, Kompas.com mengidentifikasi permasalahan pada kasus kekerasan di tempat kerja yang dialami oleh seorang karyawan berinisial CS di Jakarta Pusat. Masalah ini ditekankan melalui judul berita dan diperkuat dengan pernyataan langsung dari korban, yang mengungkap bahwa dirinya mengalami kekerasan fisik, verbal, dan psikis dari atasannya sejak tahun 2022 hingga 2024. Narasi ini menunjukkan bahwa isu kekerasan berbasis gender di lingkungan kerja bukanlah kejadian yang bersifat insidental, melainkan berlangsung dalam jangka waktu yang cukup panjang.

2. ***Diagnosis Causes***

Melihat elemen *diagnosis causes* merujuk pada pendefinisian masalah yang dimana sumber masalah menurut Kompas.com adalah adanya relasi kuasa antara korban dan atasannya. Hal ini diperkuat oleh adanya pengakuan dari korban yang harus menyakiti diri sendiri saat melakukan kesalahan. Serta dilanjutkan dengan adanya pengakuan korban yang mengalami kekerasan fisik cukup parah lainnya pada tahun 2024.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Kompas.com menilai bahwa tindakan kekerasan yang dialami oleh karyawan tersebut merupakan bentuk pelanggaran terhadap hak asasi manusia serta penyalahgunaan relasi kuasa di lingkungan kerja. Penilaian moral ini diperkuat melalui narasi yang menggambarkan penderitaan korban secara mendalam serta kesaksian yang menyoroti perilaku pelaku sebagai tindakan yang tidak berperikemanusiaan dan tidak etis. Dengan demikian, media memosisikan kasus ini sebagai persoalan serius yang mencederai nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan sosial.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Kompas.com mengusulkan penyelesaian kasus ini melalui jalur hukum, sebagaimana tercermin dari pernyataan korban berinisial CS yang telah melaporkan tindak kekerasan tersebut ke Polda Metro Jaya sejak awal September 2024. Harapan korban agar laporan ini segera ditindaklanjuti mencerminkan kebutuhan akan

penegakan hukum yang responsif dalam menangani kasus kekerasan berbasis gender di tempat kerja.

8. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

h. Artikel Berita 8

Judul : Bos Perusahaan Animasi Aniaya Pekerja, Polisi Periksa 1 Eks Karyawati

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 17 September 2024

Ringkasan: Polres Metro Jakarta Pusat tengah menyelidiki dugaan pelanggaran ketenagakerjaan dan kekerasan terhadap CS (27), mantan karyawan perusahaan gim dan animasi di Menteng. Korban mengaku mengalami kekerasan fisik, verbal, dan psikis sejak 2022 hingga Agustus 2024 oleh atasannya berinisial C (43), termasuk dipaksa menyakiti diri sendiri dan menjalani hukuman fisik yang berat. Selain itu, korban juga tidak memperoleh hak-haknya sebagai pekerja, seperti cuti keagamaan, upah lembur, dan gaji yang layak. Polisi telah memeriksa beberapa saksi dan mendapati kantor perusahaan kosong sejak Juli 2024, dengan manajemen yang tidak pernah melapor ke lingkungan sekitar. Kasus ini ditangani berdasarkan pelanggaran UU Ketenagakerjaan dan telah dilaporkan pula ke Polda Metro Jaya.

Tabel 4.8 Analisis Artikel Berita 8 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kekerasan yang dialami pekerja di perusahaan animasi

<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kekerasan terjadi atas dasar relasi kuasa dan lemahnya pengawasan dalam praktik ketenagakerjaan
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindak kekerasan yang dilakukan pelaku sangat tidak manusiawi
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pihak kepolisian menindaklanjuti laporan korban berinisial CS

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Berdasarkan elemen *define problem*, Kompas.com membingkai persoalan utama dalam berita ini sebagai kasus kekerasan yang menimpa seorang pekerja perempuan di sebuah perusahaan animasi. Pembingkaiian tersebut ditunjukkan melalui judul berita yang menyoroti kekerasan di lingkungan kerja, serta diperkuat oleh informasi dari kepolisian yang menyatakan telah menerima laporan langsung dari korban berinisial CS.

2. ***Diagnosis Causes***

Berdasarkan elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan sebagai akibat dari adanya relasi kuasa yang timpang antara atasan dan pekerja, serta lemahnya pengawasan dalam praktik ketenagakerjaan di perusahaan animasi tersebut. Penjelasan ini diperkuat melalui kesaksian korban yang menyatakan tidak memperoleh hak-haknya selama bekerja, serta didukung oleh pernyataan dari lingkungan sekitar yang menyoroti minimnya interaksi sosial perusahaan, yang mencerminkan lemahnya kontrol eksternal terhadap operasional perusahaan.

3. ***Make Moral Judgement***

Dalam elemen *make moral judgement*, Kompas.com menilai bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku terhadap korban merupakan bentuk perilaku yang tidak manusiawi dan melanggar norma moral. Penilaian ini didasarkan pada kesaksian korban yang menyebutkan telah mengalami berbagai bentuk kekerasan serta tidak mendapatkan hak-haknya

selama bekerja di perusahaan animasi tersebut. Narasi yang dibangun menunjukkan sikap tegas media dalam mengutuk tindakan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap hak dasar pekerja.

4. *Treatment Recommendation*

Dalam elemen *treatment recommendation*, Kompas.com menyampaikan bentuk penyelesaian masalah dalam ranah hukum, yakni dengan menekankan pernyataan Kasat Reskrim yang memastikan bahwa laporan korban berinisial CS akan ditindaklanjuti secara serius dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan adanya komitmen aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti kasus kekerasan di tempat kerja dan memberikan perlindungan kepada korban.

9. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

i. Artikel Berita 9

Judul : Pegawai Toko Roti di Cakung yang Dianiaya Anak Bos Pernah Dilempari Barang Sebelumnya

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 15 Desember 2024

Ringkasan: Seorang pegawai toko roti di Cakung, Jakarta Timur, berinisial D, mengalami kekerasan fisik dan verbal dari anak pemilik toko, GSH, setelah menolak permintaan mengantar makanan ke kamar pribadi pelaku. Insiden ini terekam dan viral di media sosial. D sebelumnya juga pernah dilempari barang dan dihina oleh GSH. Kasus tersebut kini ditangani oleh Polsek Cakung.

Tabel 4.9 Analisis Artikel Berita 9 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Seorang pegawai toko roti mengalami kekerasan dari anak bosnya

<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Sikap arogan pelaku sebagai anak bos toko roti
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku tidak manusiawi dan diskriminatif
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pihak kepolisian menindaklanjuti kasus kekerasan yang dialami korban hingga tuntas

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Berdasarkan elemen *define problem*, Kompas.com mbingkai permasalahan sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh anak pemilik toko roti terhadap salah satu pegawainya yang berinisial D. Framing ini ditunjukkan melalui judul berita dan diperkuat oleh pernyataan korban yang memberikan kesaksian langsung mengenai kekerasan yang dialaminya.

2. ***Diagnosis Causes***

Berdasarkan elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi sumber masalah sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh pelaku, yang merupakan anak pemilik toko roti. Sikap arogan pelaku yang merasa kebal hukum menunjukkan adanya relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban. Hal ini ditegaskan melalui kesaksian korban yang menyatakan bahwa pelaku meremehkannya sebagai "orang miskin" dan mengintimidasi ketika korban menolak permintaan yang tidak sesuai dengan tugas kerjanya, yaitu mengantarkan makanan ke kamar pribadi pelaku.

3. ***Make Moral Judgement***

Berdasarkan elemen *make moral judgement*, Kompas.com memosisikan tindakan kekerasan yang dilakukan oleh pelaku sebagai perilaku yang tidak manusiawi dan bersifat diskriminatif. Penilaian moral ini diperkuat melalui narasi yang menggambarkan korban sebagai pihak yang tertindas dalam relasi kuasa yang timpang, sehingga menunjukkan adanya pelanggaran terhadap prinsip kesetaraan dan keadilan dalam hubungan kerja.

4. ***Treatment Recommendation***

Berdasarkan elemen *treatment recommendation*, Kompas.com merekomendasikan penyelesaian kasus sebagai persoalan hukum, dengan menekankan pentingnya keterlibatan aparat kepolisian dalam menangani kasus kekerasan tersebut secara menyeluruh. Hal ini mencerminkan dorongan media terhadap penegakan hukum yang adil serta perlindungan terhadap korban dalam sistem peradilan.

10. Analisis Framing pada Media Nasional (Kompas.com)

j. Artikel Berita 10

Judul : Septia Eks Karyawan Jhon LBF Divonis Hari Ini, Begini Duduk Perkaranya

Sumber : Kompas.com

Tanggal : 22 Januari 2025

Ringkasan: Septia Dwi Pertiwi, mantan karyawan PT Hive Five, menjalani sidang putusan atas dugaan pencemaran nama baik setelah mengunggah kritik soal pelanggaran hak ketenagakerjaan di media sosial. Ia ditahan sejak Agustus 2024 meski dinilai kooperatif. Ibunya mengajukan penangguhan penahanan karena kaget dan terpukul atas penahanan tersebut. Sidang putusan digelar pada 22 Januari 2025 di PN Jakarta Pusat.

Tabel 4.10 Analisis Artikel Berita 10 Kompas.com

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Penahanan Septia mantan karyawan diposisikan sebagai reaksi hukum
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja yang bersuara
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Septia sebagai korban ketidakadilan hukum
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kuasa hukum dampingi Septia untuk dapat keadilan hukum

Rincian Analisis

1. **Define Problem**

Berdasarkan elemen *define problem*, Kompas.com membingkai persoalan penahanan Septia, mantan karyawan PT Hive Five, sebagai respons hukum terhadap dugaan pencemaran nama baik yang dilakukan melalui media sosial. Permasalahan difokuskan pada unggahan Septia di Twitter yang menyinggung pelanggaran hak-hak pekerja oleh perusahaan, dan dianggap menimbulkan kerugian reputasi bagi pihak perusahaan.

2. **Diagnosis Causes**

Berdasarkan elemen *diagnosis causes*, Kompas.com mengidentifikasi akar permasalahan sebagai tindakan Septia yang dianggap mencemarkan nama baik perusahaan melalui media sosial. Namun, dalam pemberitaan tersebut juga menggambarkan bahwa kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan hukum terhadap pekerja yang menyuarkan keluhannya terkait pelanggaran hak selama bekerja. Hal ini menunjukkan adanya ketimpangan relasi kuasa antara perusahaan dan karyawan.

3. **Make Moral Judgement**

Dalam elemen *make moral judgement*, Kompas.com membingkai kasus ini dengan sudut pandang yang menempatkan Septia sebagai pihak yang mengalami ketidakadilan hukum. Penilaian moral ini diperkuat melalui pernyataan kuasa hukum Septia, Ganda M. Sihite, yang menjelaskan bahwa kliennya dilaporkan atas tuduhan pencemaran nama baik setelah menyuarkan dugaan pelanggaran hak-hak pekerja. Framing ini mengindikasikan bahwa media menilai tindakan hukum terhadap Septia sebagai bentuk pembungkaman terhadap suara pekerja.

4. **Treatment Recommendation**

Dalam elemen *treatment recommendation*, Kompas.com merekomendasikan penyelesaian melalui jalur keadilan hukum bagi Septia. Hal ini ditunjukkan dengan peliputan mengenai upaya Sumartini, ibu dari Septia, yang secara aktif mengajukan surat penangguhan penahanan ke Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat. Tindakan tersebut dipotret sebagai bentuk perjuangan keluarga dalam menuntut keadilan dan perlindungan hukum

bagi korban, sekaligus menyoroti pentingnya respons hukum yang berpihak kepada pekerja yang menyuarkan ketidakadilan.

4.2.2 Analisis Artikel Berita Konde.co

1. Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)

a. Artikel Berita 1

Judul : Disekap dan Tak Diberi Makan: 15 Februari Hari PRT, Kenapa Nasib Mereka Masih Begini?

Sumber : Konde.co

Tanggal : 28 Februari 2024

Ringkasan: Kasus kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) seperti yang dialami Isabela Pelu dan lima PRT lainnya di Jakarta menyoroti lemahnya perlindungan hukum bagi PRT di Indonesia. Sejak 2021, JALA PRT mencatat ribuan kasus kekerasan, sementara RUU Perlindungan PRT yang telah diperjuangkan selama dua dekade belum juga disahkan, mencerminkan kelalaian negara terhadap nasib jutaan PRT yang mayoritas berasal dari kelompok rentan.

Tabel 4.11 Analisis Artikel Berita 1 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kekerasan terhadap PRT masih sering terjadi dalam berbagai bentuk
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kurangnya perlindungan hukum dari negara
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan kekerasan merupakan bentuk pelanggaran HAM
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Barisan Perempuan mendesak pimpinan DPR dan pemerintah

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Dalam elemen *define problem*, Konde.co membingkai persoalan utama sebagai tingginya angka kekerasan yang dialami oleh Pekerja Rumah

Tangga (PRT) di Indonesia, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, maupun ekonomi. Framing ini ditegaskan melalui judul dan isi berita yang menyoroti data dari JALA PRT, yang mencatat sebanyak 3.308 kasus kekerasan terhadap PRT. Temuan ini menjadi dasar narasi bahwa kekerasan terhadap PRT merupakan permasalahan struktural yang membutuhkan perhatian serius dari berbagai pihak..

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Konde.co mengidentifikasi akar permasalahan sebagai minimnya perlindungan hukum terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) dari negara. Framing ini ditegaskan melalui pernyataan Mutiara Ika, perwakilan dari Perempuan Mahardhika, yang menyoroti bahwa kekerasan terhadap PRT terus berlangsung akibat belum disahkannya RUU Perlindungan PRT oleh pimpinan DPR. Dengan demikian, media menempatkan tanggung jawab struktural pada lambannya proses legislasi sebagai penyebab utama ketidakadilan yang dialami para PRT.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Konde.co memposisikan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Media ini menyoroti bahwa tindakan kekerasan yang terus terjadi mencerminkan kegagalan negara dalam menjamin hak dan perlindungan bagi kelompok rentan. Dalam hal ini, DPR dan pemerintah dipandang abai serta lalai dalam menjalankan tanggung jawab konstitusionalnya untuk mewujudkan keadilan bagi PRT, terutama melalui keterlambatan pengesahan regulasi yang berpihak pada mereka.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Konde.co mengajukan penyelesaian melalui jalur keadilan hukum yang berpihak kepada para Pekerja Rumah Tangga (PRT). Media ini menekankan pentingnya percepatan pengesahan RUU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (RUU PPRT) sebagai bentuk perlindungan hukum yang konkret. Hal tersebut diperkuat dengan pernyataan tegas dari Barisan Perempuan untuk UU PPRT

yang mendesak DPR dan pemerintah agar segera mengesahkan regulasi tersebut. Desakan ini disampaikan sebagai langkah untuk mencegah terjadinya kekerasan lanjutan dan memulihkan kondisi psikologis para korban.

2. Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)

b. Artikel Berita 2

Judul : PRT ‘Kabur’ dari Rumah Majikan Karena Disiksa, Bagaimana Cara Melaporkannya?

Sumber : Konde.co

Tanggal : 29 Februari 2024

Ringkasan: Seorang PRT yang mengalami kekerasan fisik, psikis, dan tidak dibayar gaji dapat melapor ke polisi di lokasi kejadian, yakni Jakarta. Meski belum ada UU khusus PRT, kasus dapat diproses melalui UU PKDRT karena PRT yang tinggal di rumah majikan termasuk dalam lingkup rumah tangga. Tindakan majikan juga bisa dijerat pasal penggelapan dalam KUHP. Disarankan korban didampingi LBH agar proses hukum berjalan optimal.

Tabel 4.12 Analisis Artikel Berita 2 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kekerasan yang dialami oleh seorang PRT di Jakarta
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Belum disahkannya RUU PRT oleh DPR
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan kekerasan terhadap PRT dinilai sebagai bentuk pelanggaran HAM
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pendampingan hukum dari LBH berspektif gender

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Berdasarkan elemen *define problem*, Konde.co mengidentifikasi permasalahan utama pada kasus kekerasan yang dialami oleh seorang Pekerja Rumah Tangga (PRT) di Jakarta. Permasalahan ini diangkat melalui narasi yang menyoroti pengalaman korban yang harus melarikan diri dari tempat kerjanya akibat tindakan penyiksaan serta tidak terpenuhinya hak-hak dasarnya sebagai pekerja. Pernyataan Asmanah, yang merupakan kerabat korban, memperkuat kerangka permasalahan yang ditonjolkan media ini dalam pemberitaan tersebut.

2. ***Diagnosis Causes***

Berdasarkan elemen *diagnosis causes*, Konde.co mengidentifikasi akar permasalahan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) terletak pada belum disahkannya Rancangan Undang-Undang Perlindungan PRT oleh pimpinan DPR. Ketidakjelasan payung hukum ini dinilai sebagai faktor struktural yang menyebabkan kekerasan terhadap PRT masih terus terjadi dan belum mendapatkan penanganan yang memadai secara sistemik.

3. ***Make Moral Judgement***

Dalam elemen *make moral judgement*, Konde.co membingkai tindakan kekerasan terhadap Pekerja Rumah Tangga (PRT) sebagai bentuk pelanggaran terhadap Hak Asasi Manusia (HAM). Penilaian moral ini tercermin dari penyampaian artikel yang menekankan perlunya pertanggungjawaban hukum atas tindakan kekerasan yang dialami korban, serta dorongan terhadap perlindungan yang lebih tegas bagi PRT sebagai kelompok rentan.

4. ***Treatment Recommendation***

Berdasarkan elemen *treatment recommendation*, Konde.co mengusulkan penyelesaian melalui pendampingan hukum oleh Lembaga Bantuan Hukum (LBH) yang memiliki perspektif berbasis hak-hak perempuan dan pemahaman mendalam terhadap isu-isu yang dihadapi oleh Pekerja Rumah Tangga (PRT). Pendekatan ini diharapkan mampu mendukung korban dalam upaya memperoleh keadilan serta mendorong penanganan kasus kekerasan secara lebih berpihak dan sensitif terhadap konteks kerentanan korban.

3. Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)

c. Artikel Berita 3

Judul : Ketua KPU Diduga Lakukan Tindakan Asusila, Merayu Korban Berbasis Relasi Kuasa

Sumber : Konde.co

Tanggal : 25 April 2024

Ringkasan: Pada April 2024, Ketua KPU Hasyim Asy'ari dilaporkan ke DKPP oleh seorang anggota Panitia Pemilihan Luar Negeri (PPLN) atas dugaan tindakan asusila berbasis relasi kuasa saat menjalankan tugas dinas. Laporan yang diajukan melalui LKBH FHUI dan LBH APIK ini menyoroti penyalahgunaan jabatan serta pola perilaku berulang, serupa dengan kasus sebelumnya yang melibatkan Hasnaeni Moein. Sejumlah organisasi masyarakat sipil mendesak pembenahan sistem seleksi penyelenggara pemilu agar lebih berperspektif gender dan etika. Selain itu, Hasyim juga tercatat melakukan pelanggaran etik lainnya, termasuk dalam penghitungan kuota perempuan dan rekrutmen anggota KPU daerah.

Tabel 4.13 Analisis Artikel Berita 3 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Dugaan tindakan asusila ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap seorang anggota PPLN
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Penyalahgunaan kekuasaan ketua KPU Hasyim Asy'ari
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pelanggaran etik seorang pejabat publik
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Membangun ekosistem kerja yang nyaman terhadap perempuan

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Berdasarkan elemen *define problem*, Konde.co mengangkat isu dugaan tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, terhadap seorang anggota PPLN dengan latar belakang adanya relasi kuasa yang timpang. Hal ini tercermin dalam judul berita dan diperkuat oleh pernyataan Maria Dianita selaku kuasa hukum korban yang mencatat adanya pemanfaatan relasi kuasa untuk melakukan tindakan asusila secara berulang.

2. ***Diagnosis Causes***

Berdasarkan elemen *diagnosis causes*, Konde.co mengidentifikasi sumber masalah sebagai penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan oleh Hasyim Asy'ari dalam kapasitasnya sebagai Ketua KPU. Hal ini didukung oleh rekam jejak pelanggaran kode etik serupa yang pernah dilakukan oleh yang bersangkutan.

3. ***Make Moral Judgement***

Berdasarkan elemen *make moral judgement*, Konde.co menilai bahwa tindakan asusila yang dilakukan oleh Ketua KPU Hasyim Asy'ari merupakan pelanggaran etik serius yang tidak sepatutnya terjadi pada seorang pejabat publik. Pandangan ini diperkuat oleh pernyataan dari sejumlah lembaga seperti Koalisi Perempuan Indonesia dan Komnas Perempuan yang menyebut tindakan tersebut sebagai bentuk kegagalan moral dalam menjalankan peran kepemimpinan.

4. ***Treatment Recommendation***

Dalam elemen *treatment recommendation*, Konde.co mengusulkan langkah penyelesaian yang berfokus pada perlindungan terhadap kekerasan dengan perspektif gender serta peningkatan keterwakilan dalam memperjuangkan hak-hak perempuan. Hal ini tercermin dari rekomendasi Komisioner Komnas Perempuan, Siti Aminah, yang mengimbau lembaga seperti KPU, Bawaslu, dan DKPP untuk menciptakan ekosistem kerja yang aman bagi para pekerja perempuan.

4. **Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)**

d. Artikel Berita 4

Judul : Ketua KPU Hasyim Asy'ari Dipecat: Terbukti Paksa Korban Lakukan Hubungan Seksual

Sumber : Konde.co

Tanggal : 4 Juli 2024

Ringkasan: Pada 3 Juli 2024, DKPP memberhentikan Hasyim Asy'ari dari jabatan Ketua KPU setelah terbukti melakukan pelanggaran etik berupa tindakan asusila terhadap CA, anggota PPLN Den Haag. Hasyim diduga menyalahgunakan relasi kuasa dan jabatan untuk mendekati serta merugikan korban. CA menyampaikan apresiasi atas putusan DKPP yang dianggapnya sebagai bentuk perlindungan terhadap korban dan integritas pemilu. Selain itu, Hasyim juga pernah dijatuhi sanksi atas pelanggaran etik lainnya, termasuk kebijakan diskriminatif terkait keterwakilan perempuan. Presiden RI diminta menindaklanjuti pemecatan dalam waktu tujuh hari, dengan pengawasan dari Bawaslu.

Tabel 4.14 Analisis Artikel Berita 4 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pelanggaran etik ketua KPU Hasyim Asy'ari berbasis relasi kuasa
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Penyalahgunaan kekuasaan ketua KPU Hasyim Asy'ari terhadap korban
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan ketua KPU Hasyim Asy'ari merendahkan martabat perempuan
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pemecatan ketua KPU Hasyim Asy'ari dari jabatannya oleh DKPP

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat dari elemen *define problem* dalam berita ini, Konde.co mendefinisikan masalah pada pelanggaran etik Ketua KPU, Hasyim

Asy'ari, atas tindakan asusila terhadap seorang anggota PPLN yang didasarkan pada relasi kuasa. Hal ini diperkuat dengan pernyataan dari kuasa hukum korban, Aristo, yang menyebut tindakan asusila Hasyim terhadap kliennya terjadi karena penyalahgunaan relasi kuasa.

2. ***Diagnosis Causes***

Dilihat dari elemen *diagnosis causes*, merujuk pada pendefinisian masalah, sumber masalah menurut Konde.co adalah adanya penyalahgunaan kekuasaan oleh Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, terhadap korban yang merupakan anggota PPLN. Hal ini diperkuat dengan pernyataan Maria Dianita dari LBH FHUI yang mencatat pola perilaku Hasyim berdasarkan relasi kuasa, sehingga menjadi faktor utama terjadinya tindakan asusila tersebut.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Konde.co menyimpulkan bahwa tindakan asusila Ketua KPU, Hasyim Asy'ari, terhadap anggota PPLN adalah perilaku yang tidak etis dan bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi serta kesetaraan gender. Pernyataan ini juga didukung oleh DKPP yang menilai bahwa tindakan Hasyim telah merendahkan martabat perempuan dan merusak kepercayaan publik terhadap dirinya sebagai pejabat penyelenggara pemilu.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Konde.co menyampaikan langkah penyelesaian yang diarahkan untuk memberikan perlindungan kepada korban tindak asusila yang terjadi karena penyalahgunaan relasi kuasa. Dukungan atas upaya ini juga terlihat dari keputusan DKPP yang memecat Ketua KPU Hasyim Asy'ari, serta pengawasan lanjutan yang dilakukan oleh Bawaslu.

5. **Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)**

e. **Artikel Berita 5**

Judul : Pekerja Magang di Kedubes Alami Pelecehan Seksual,
Lapor Polisi Kasusnya Malah Dihentikan

Sumber : Konde.co

Tanggal : 4 Februari 2025

Ringkasan: Seorang pekerja magang bernama Mitra mengalami pelecehan seksual fisik berulang oleh atasannya di sebuah kedutaan besar pada Maret 2019. Meskipun telah melaporkan insiden tersebut ke internal perusahaan dan kemudian ke Polda Metro Jaya, kasusnya berlarut-larut dan penyelidikan dihentikan dengan alasan tidak ditemukan tindak pidana, yang disayangkan oleh LBH APIK Jakarta dan para ahli. Berbagai pihak menyoroti kurangnya perspektif korban dalam penanganan kasus ini, di mana penyidik mengabaikan sejumlah alat bukti, membebankan pembuktian pada korban, dan bahkan mempertemukan korban dengan terduga pelaku. LBH APIK Jakarta mendesak pembukaan kembali penyelidikan, pelaksanaan rekomendasi penanganan kasus, penerapan UU TPKS, dan perubahan mendasar dalam perspektif kepolisian agar lebih berpihak kepada korban perempuan.

Tabel 4.15 Analisis Artikel Berita 5 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketidakadilan penegakan hukum
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Minimnya perspektif korban dalam proses hukum
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Ketidakadilan sistem hukum dianggap tidak bermoral
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Pendampingan LBH APIK Jakarta bersama korban

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Pada elemen *define problem*, Konde.co menggambarkan masalah berupa ketidakadilan dalam penegakan hukum terkait kasus pelecehan seksual yang dialami oleh seorang pekerja magang di Kedutaan Besar. Hal ini tercermin

dari judul berita dan diperkuat oleh pernyataan pengacara LBH APIK, Tuani Sondang, yang menyatakan bahwa tindakan pelaku tidak dianggap sebagai tindak pidana sehingga tidak bisa diproses secara hukum.

2. ***Diagnosis Causes***

Pada elemen *diagnosis causes*, Konde.co mengidentifikasi sumber masalah sebagai kurangnya perhatian terhadap perspektif korban dalam proses hukum. Hal ini didukung oleh pernyataan dari penyidik yang menyatakan bahwa bukti-bukti yang ada tidak cukup kuat untuk melanjutkan proses hukum.

3. ***Make Moral Judgement***

Pada elemen *make moral judgement*, Konde.co menilai bahwa ketidakadilan yang terjadi dalam sistem hukum Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang tidak etis bagi korban. Situasi ini dianggap memperburuk penderitaan korban, terutama dari segi psikologis, karena haknya atas keadilan tidak terpenuhi.

4. ***Treatment Recommendation***

Pada elemen *treatment recommendation*, Konde.co menyampaikan bahwa upaya penyelesaian yang diusulkan melibatkan pendampingan dari LBH APIK Jakarta bagi korban pekerja magang di Kedutaan Besar. Pendampingan ini menuntut agar institusi terkait memberikan dukungan penuh kepada korban dan menjatuhkan sanksi maksimal kepada pelaku. Selain itu, LBH APIK Jakarta juga mendorong Polda Metro Jaya untuk segera mengesahkan Rancangan Perkap yang mengatur penanganan kasus perempuan yang berhadapan dengan hukum, guna memastikan perlindungan bagi korban pelecehan seksual.

6. **Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)**

f. **Artikel Berita 6**

Judul : Penganiayaan Kolaborasi Data, Tercatat 34.682 Perempuan Jadi Korban Kekerasan

Sumber : Konde.co

Tanggal : 20 Agustus 2024

Ringkasan: Tiga lembaga—KPPPA, Komnas Perempuan, dan FPL—meluncurkan laporan data kekerasan terhadap perempuan yang mencatat peningkatan laporan kasus, terutama di Pulau Jawa karena dukungan infrastruktur. Anak-anak, pelajar, dan perempuan bekerja menjadi kelompok paling rentan, dengan kekerasan seksual, fisik, dan psikis sebagai bentuk kekerasan tertinggi. Suami tercatat sebagai pelaku utama dalam kekerasan domestik, menunjukkan tingginya kasus marital rape. Kelompok rentan seperti perempuan dengan HIV dan komunitas LGBTQ+ juga mengalami diskriminasi dan kerentanan ganda. Laporan ini merekomendasikan penguatan implementasi UU TPKS, peningkatan koordinasi lembaga, serta perlindungan khusus bagi kelompok rentan.

Tabel 4.16 Analisis Artikel Berita 6 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Tingginya angka kekerasan terhadap perempuan
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Kuatnya budaya patriarki dan relasi kuasa yang timpang antara pelaku dan korban
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pelaku kekerasan dinilai melanggar prinsip keadilan gender
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Implementasi UU TPKS oleh pemerintah dan penegak hukum

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Pada elemen *define problem*, Konde.co mengidentifikasi masalah sebagai tingginya angka kekerasan terhadap perempuan di Indonesia. Hal ini terlihat dari judul berita dan diperkuat oleh pernyataan Kepala Biro Data dan

Informasi KPPPA, Sulistyو Wibowo, yang menyebutkan bahwa persentase terbesar korban kekerasan adalah perempuan, terutama yang bekerja di berbagai sektor dan menghadapi beragam bentuk kekerasan.

2. *Diagnosis Causes*

Pada elemen *diagnosis causes*, Konde.co mengidentifikasi sumber masalah sebagai kuatnya budaya patriarki yang masih melekat dan ketimpangan relasi kuasa antara pelaku dan korban. Pernyataan Sulistyو Wibowo memperkuat hal ini dengan menyoroti bahwa kekerasan terhadap perempuan sering terjadi karena adanya relasi kuasa hegemonik.

3. *Make Moral Judgement*

Pada elemen *make moral judgement*, Konde.co menyatakan bahwa tindakan pelaku kekerasan tersebut melanggar prinsip keadilan serta kesetaraan gender.

4. *Treatment Recommendation*

Pada elemen *treatment recommendation*, Konde.co mengusulkan agar pemerintah dan aparat penegak hukum menunjukkan komitmen kuat dalam menangani kasus kekerasan terhadap perempuan dengan mengimplementasikan Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS) serta menjalankan kebijakan yang mendukung dan responsif terhadap kebutuhan para korban.

7. Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)

g. Artikel Berita 7

Judul : Stress dan Frustrasi di Dunia Kerja, Perempuan Bisa Keluar karena Kondisi Ini

Sumber : Konde.co

Tanggal : 7 Agustus 2024

Ringkasan: Bentuk ketidakadilan yang dialami perempuan di dunia kerja, seperti pelecehan verbal, stereotip lemah, diskriminasi upah, dan beban ganda sebagai pekerja dan pengurus rumah tangga. Untuk mengatasi hal ini, diperlukan upaya bersama melalui penegakan kebijakan anti-diskriminasi, transparansi gaji,

akses pelatihan yang setara, serta kebijakan cuti ayah guna mendorong peran bersama dalam pengasuhan. Kesetaraan gender di tempat kerja harus menjadi tanggung jawab bersama antara pemerintah, perusahaan, dan masyarakat.

Tabel 4.17 Analisis Artikel Berita 7 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Ketidakadilan gender yang dialami perempuan di dunia kerja
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Masyarakat masih menganut budaya patriarki
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Ketidakadilan moral dan sosial
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Kebijakan anti-diskriminasi

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat dari elemen *define problem* dalam berita ini Konde.co mendefinisikan masalah pada ketidakadilan gender yang dialami oleh perempuan di dunia kerja. Hal ini dicerminkan dari judul berita serta diperkuat dengan adanya bentuk-bentuk ketidakadilan gender yang telah disebutkan dalam artikel berita tersebut.

2. *Diagnosis Causes*

Dilihat dari elemen *diagnosis causes* merujuk pada pendefinisian masalah yang dimana sumber masalah menurut Konde.co, masyarakat masih menganut budaya patriarki. Hal ini diperkuat dengan adanya stereotip sosial bahwa perempuan tidak layak atau tidak mampu menjalankan tugas-tugas berat atau tanggung jawab yang tinggi.

3. *Make Moral Judgement*

Dilihat dari elemen *make moral judgement*, dalam kasus ini Konde.co menyimpulkan keputusan moral melihat dari adanya ketidakadilan moral

dan sosial terhadap perempuan. Hal ini dinilai sebagai bentuk diskriminasi yang tidak dapat dibenarkan.

4. **Treatment Recommendation**

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, Konde.co memberikan upaya penyelesaian yang diusulkan untuk mengatasi ketidakadilan gender di dunia kerja seperti kebijakan anti-diskriminasi, transparansi gaji, akses edukasi pelatihan, bagi perempuan untuk mewujudkan lingkungan kerja yang adil dan setara.

8. **Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)**

h. **Artikel Berita 8**

Judul : Overwork Sampai Union Busting Menimpa Septia, Sutradara Film Sampai Jurnalis CNN

Sumber : Konde.co

Tanggal : 9 September 2024

Ringkasan: Berbagai kasus pelanggaran hak pekerja di Indonesia, khususnya di sektor film, media, dan industri manufaktur. Kasus meninggalnya Rifqi Novara akibat kecelakaan kerja menyoroti isu kelelahan dan overwork dalam industri perfilman, sementara Septia Dwi Pertiwi menghadapi kriminalisasi usai mengungkap pelanggaran ketenagakerjaan di media sosial. Di sisi lain, pemutusan hubungan kerja sepihak terhadap pekerja CNN Indonesia serta praktik union busting terhadap serikat pekerja seperti yang dialami Ulfa dari FSPMI menunjukkan lemahnya perlindungan hukum bagi pekerja. Kondisi ini diperparah oleh berlakunya UU Cipta Kerja yang dinilai mengurangi jaminan terhadap hak-hak pekerja.

Tabel 4.18 Analisis Artikel Berita 8 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Pelanggaran hak-hak pekerja di berbagai sektor industri

<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Buruknya sistem ketenagakerjaan dan lemahnya regulasi
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan terhadap pekerja dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Perlindungan hukum bagi pekerja

Rincian Analisis

1. *Define Problem*

Melihat elemen *define problem* dalam berita ini Konde.co mendefinisikan masalah pada pelanggaran hak-hak pekerja di berbagai sektor industri. Hal ini dicerminkan dari judul berita serta diperkuat dengan berbagai kasus pelanggaran yang dialami oleh pekerja.

2. *Diagnosis Causes*

- Dilihat dari elemen *diagnosis causes* merujuk pada pendefinisian masalah yang dimana sumber masalah menurut Konde.co, buruknya sistem ketenagakerjaan dan lemahnya regulasi, terutama setelah diberlakukannya UU Cipta Kerja. Selain itu, minimnya perlindungan hukum serta praktik union busting dinilai menjadi penyebab terjadinya masalah ini.

3. *Make Moral Judgement*

Dilihat dari elemen *make moral judgement*, dalam kasus ini Konde.co menyimpulkan keputusan moral melihat dari tindakan seperti overwork, PHK pekerja secara sepihak, dan kriminalisasi buruh dianggap tidak adil dan melanggar hak asasi manusia.

4. *Treatment Recommendation*

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, Konde.co memberikan upaya penyelesaian yang diusulkan sebagai perlindungan hukum bagi pekerja serta penguatan peran serikat buruh untuk memperjuangkan hak pekerja.

9. Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)

i. Artikel Berita 9

Judul : Belajar dari Kasus NewJeans, Kelas Pekerja GenZ Lawan Stigma dan Kekerasan di Tempat Kerja

Sumber : Konde.co

Tanggal : 5 Desember 2024

Ringkasan: Kasus antara NewJeans dan agensinya, ADOR di bawah HYBE, mengungkap diskriminasi dan perlakuan tidak adil yang mereka alami sebagai artis K-Pop. Berani bersuara, mereka menuntut pemenuhan hak, memicu debat soal status artis sebagai buruh, dan menyoroti minimnya perlindungan hukum dalam industri hiburan. Tindakan mereka juga memperlihatkan keberanian generasi Z dalam menghadapi budaya kerja yang eksploitatif.

Tabel 4.19 Analisis Artikel Berita 9 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Perlakuan tidak adil dan eksploitatif terhadap grup NewJeans oleh pihak agensi
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Pemecatan mantan CEO ADOR memicu ketidakpuasan NewJeans
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Pihak agensi dinilai tidak etis dan tidak bertanggungjawab
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Gerakan sosial seperti #IdolsAreWorkers

Rincian Analisis

1. **Define Problem**

Melihat dari elemen *define problem* dalam berita ini Konde.co mendefinisikan masalah pada perlakuan tidak adil serta eksploitatif yang dilakukan pihak agensi dari girl group NewJeans. Hal ini dicerminkan dari judul berita serta diperkuat dengan adanya diskriminasi, pelanggaran privasi, pengucilan dalam lingkungan kerja serta sabotase produksi.

2. **Diagnosis Causes**

Dilihat dari elemen *diagnosis causes* merujuk pada pendefinisian masalah yang dimana sumber masalah menurut Konde.co, pemecatan mantan *CEO*

ADOR, Min Hee Jin yang memicu ketidakpuasan NewJeans. Selain itu dalam industri K-Pop, struktur kontrak eksklusif yang menempatkan artis dalam posisi rentan tanpa perlindungan tenaga kerja yang memadai, serta budaya kerja yang hirarkis dan menormalisasi ketimpangan relasi kuasa.

3. ***Make Moral Judgement***

Dilihat dari elemen *make moral judgement*, dalam kasus ini Konde.co menyimpulkan keputusan moral melihat dari pihak agensi yang dinilai tidak etis dan bertanggungjawab terhadap artisnya dalam melindungi data pribadi dan memberikan ruang aman bagi mereka.

4. ***Treatment Recommendation***

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, Konde.co memberikan upaya penyelesaian yang diusulkan sebagai gerakan sosial seperti #IdolsAreWorkers menjadi simbol dorongan untuk artis dan pekerja seni sebagai buruh untuk mendapatkan perlindungan seperti pekerja yang diakui dalam undang-undang.

10. **Analisis Framing pada Media Alternatif (Konde.co)**

j. **Artikel Berita 10**

Judul : #SuaraPekerja: “Diskriminalisasi, Dipungli, & Dilanggar Hak-Haknya” Kondisi Kerja Buruh Perusahaan Taiwan

Sumber : Konde.co

Tanggal : 24 Februari 2025

Ringkasan: T, seorang buruh perempuan di PT TE, dikriminalisasi saat mendampingi korban kekerasan seksual di tempat kerja, meski perannya dilindungi UU TPKS. Kasus ini mencerminkan lemahnya perlindungan terhadap pendamping dan buruh perempuan. Selain itu, ditemukan praktik pungutan liar akibat sistem kerja kontrak jangka pendek serta pelanggaran hak maternitas seperti diskriminasi terhadap buruh hamil dan sulitnya akses cuti haid dan keguguran, yang juga terjadi di perusahaan Taiwan lainnya di Indonesia.

Tabel 4.20 Analisis Artikel Berita 20 Konde.co

Elemen	Hasil
<i>Define Problem</i> (Pendefinisian Masalah)	Kriminalisasi terhadap seorang buruh perempuan
<i>Diagnosis Causes</i> (Memperkirakan Penyebab Masalah)	Struktur kerja yang eksploitatif dan patriarkal
<i>Make Moral Judgement</i> (Membuat Keputusan Moral)	Tindakan kriminalisasi dinilai sebagai bentuk pelanggaran hak asasi manusia
<i>Treatment Recommendation</i> (Penyelesaian Masalah)	Korban disarankan melapor ke Komnas Perempuan

Rincian Analisis

1. ***Define Problem***

Melihat dari elemen *define problem* dalam berita ini Konde.co mendefinisikan masalah pada adanya kriminalisasi terhadap seorang buruh perempuan berinisial T dan anggota Satgas Penanganan Kekerasan Seksual di PT TE saat mendampingi korban kekerasan seksual.

2. ***Diagnosis Causes***

Dilihat dari elemen *diagnosis causes* merujuk pada pendefinisian masalah yang dimana sumber masalah menurut Konde.co, struktur kerja yang eksploitatif dan patriarkal. Hal ini diperkuat pada minimnya perlindungan hukum terhadap pendamping korban kekerasan yang menjadi penyebab terjadinya kriminalisasi terhadap korban seorang buruh perempuan berinisial T.

3. ***Make Moral Judgement***

Dilihat dari elemen *make moral judgement*, dalam kasus ini Konde.co menyimpulkan keputusan moral melihat tindakan kriminalisasi yang dialami korban yakni seorang buruh perempuan berinisial T dinilai sebagai bentuk ketidakadilan dan melanggar hak asasi manusia serta bertentangan dengan perlindungan hukum dalam UU TPKS.

4. ***Treatment Recommendation***

Dilihat dari elemen *treatment recommendation*, Konde.co memberikan upaya penyelesaian yang diusulkan yakni korban disarankan melaporkan tindakan kriminalisasi kepada Komnas Perempuan untuk mendapatkan perlindungan. Selain itu, pentingnya integrasi isu kekerasan dan pelecehan berbasis gender ke dalam sistem manajemen K3 (Kesehatan dan Keselamatan Kerja).

4.3 Perbandingan Analisis *Framing*

Setelah melakukan analisis terhadap artikel yang dimuat di Kompas.com dan Konde.co, pembahasan perbandingan akan dikaji menggunakan teori framing yang dikembangkan oleh Robert Entman. Entman merupakan pakar komunikasi politik yang menyoroti bagaimana media menyusun dan menyajikan informasi secara selektif untuk membentuk persepsi, pemahaman, serta penilaian audiens terhadap suatu isu. Menurut Entman, framing berperan penting dalam membentuk cara seseorang menafsirkan peristiwa atau persoalan. Hal ini dilakukan melalui penekanan pada aspek-aspek tertentu, pengabaian terhadap unsur lain, serta pengaitannya dengan kerangka berpikir yang telah dimiliki oleh masyarakat. Dengan begitu, framing mampu mengarahkan fokus dan cara pandang publik terhadap suatu isu.

Media memiliki peranan penting dalam membentuk opini masyarakat serta cara individu memaknai peristiwa sosial melalui pendekatan framing. Dalam konteks penelitian ini, pendekatan tersebut digunakan untuk melihat bagaimana isu kekerasan terhadap pekerja perempuan disoroti oleh media. Pemahaman terhadap konsep framing Robert N. Entman memungkinkan kita untuk lebih kritis terhadap bagaimana media menyajikan informasi dan membentuk sudut pandang publik terkait persoalan ketenagakerjaan dan perlindungan perempuan. Melalui teknik framing, media dapat secara signifikan memengaruhi cara masyarakat memahami realitas sosial.

Tabel 4.21 Perbandingan Pembingkai Pemberitaan Kekerasan Pekerja Perempuan Pada Situs Berita Daring (Analisis Framing Robert N. Entman pada Kompas.com dan Konde.co Periode Januari 2024 – Februari 2025)

Perangkat Framing	Kompas.com	Konde.co
Define Problem	Kompas.com membingkai kekerasan terhadap pekerja perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang menyoroti pelaku, mencerminkan nilai <i>proximity</i> .	Konde.co membingkai kekerasan terhadap pekerja perempuan sebagai pelanggaran hak asasi manusia dengan fokus pada korban, mencerminkan nilai <i>human interest</i> .
Diagnosis Causes	Kompas.com menyoroti relasi kuasa yang timpang sebagai penyebab, di mana perempuan menjadi korban karena terancam dan tak memiliki pilihan selain patuh pada atasan.	Konde.co menilai budaya patriarki sebagai penyebab utama, di mana perempuan menjadi korban karena dipandang tidak memiliki kuasa.
Make Moral Judgement	Kompas.com menekankan bahwa tindakan para pelaku kekerasan sebagai pelanggaran hukum.	Konde.co menekankan pada tindakan para pelaku kekerasan sebagai pelanggaran prinsip keadilan gender.
Treatment Recommendation	Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum.	Konde.co cenderung menyelesaikan masalah dengan jalur hukum dan didampingi oleh mitra yang mewakili suara perempuan.

Sumber : Olahan Peneliti

Tabel 4.3.1 mengilustrasikan bagaimana interpretasi dan definisi yang beragam terhadap peristiwa yang sama dapat muncul dalam kasus kekerasan pekerja perempuan antara Kompas.com dan Konde.co. Tabel ini menunjukkan adanya kesamaan definisi masalah antara Kompas.com dan Konde.co yang membingkai kasus kekerasan pekerja perempuan sebagai masalah pelanggaran hak asasi manusia. Namun, Kompas.com lebih berfokus pada perlakuan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap korban. Dengan begitu, kedua media memiliki tema publikasi yang berbeda. Sementara, Konde.co lebih berfokus pada kekerasan yang dialami oleh pekerja perempuan sebagai korban. Dengan begitu, kedua media tersebut memiliki tema publikasi yang berbeda.

Hal ini dapat dilihat dari berita yang diambil untuk diteliti membahas tentang kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan sebagai bentuk pelanggaran HAM. Dimana fokus utama Kompas.com adalah membahas bagaimana perlakuan / tindakan kekerasan yang dilakukan oleh para pelaku terhadap para pekerja perempuan sebagai korban dengan didominasi adanya relasi kuasa. Sementara, Konde.co fokus pada bagaimana kasus kekerasan tersebut dapat dialami oleh para pekerja perempuan dan membawa kasus tersebut ke jalur hukum dengan dampingan mitra yang mewakili suara perempuan.

Dalam elemen mendiagnosis penyebab, terdapat perbedaan framing. Menurut Kompas.com, akar masalahnya adalah adanya relasi kuasa yang didominasi oleh pelaku. Pekerja perempuan dalam kasus ini menjadi korban yang berisiko mengalami kekerasan dari atasannya. Menurut Kompas.com, kasus kekerasan tersebut terjadi karena para pekerja perempuan tidak punya pilihan lain selain taat terhadap atasannya hingga akhirnya terjadi tindakan yang tidak adil dari pelaku. Framing ini menekankan bahwa ketimpangan struktur kekuasaan di tempat kerja menjadi faktor utama yang memungkinkan terjadinya kekerasan terhadap pekerja perempuan.

Sementara, Konde.co melihat kasus ini disebabkan karena masih banyaknya masyarakat yang menganut budaya patriarki. Budaya patriarki dalam hal ini menempatkan laki-laki sebagai pihak yang dominan, sementara perempuan sering kali dianggap lebih rendah dan tidak memiliki otoritas dalam mengambil keputusan, termasuk dalam menyikapi kekerasan yang mereka alami di lingkungan kerja. Akibatnya, banyak pekerja perempuan merasa tidak memiliki kekuatan atau dukungan yang cukup untuk melawan atau melaporkan tindakan kekerasan yang menimpa mereka. Konde.co, sebagai media yang fokus pada isu-isu perempuan dan keadilan sosial, menyoroti pentingnya kesadaran kolektif untuk menghapus budaya patriarki guna menciptakan ruang kerja yang aman, adil, dan setara bagi semua gender.

Pada elemen *Make Moral Judgement* Kompas.com menekankan tindakan kekerasan yang dilakukan pelaku sebagai pelanggaran hukum dan hak asasi manusia (HAM). Para pekerja perempuan memiliki hak yang harus dilindungi, baik sebagai individu maupun sebagai tenaga kerja, sesuai dengan Undang-Undang

Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (Gani, 2016). Konde.co memandang tindakan kekerasan tersebut sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan gender, karena menunjukkan adanya ketimpangan kekuasaan dan diskriminasi berbasis gender di tempat kerja. Dalam hal ini, berita ini juga mengandung nilai berita *conflict* atau konflik, karena kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan menunjukkan adanya pertentangan antara kepentingan pekerja dan penyalahgunaan wewenang oleh atasan, yang berdampak serius pada hak dan martabat perempuan di dunia kerja.

Pada elemen *Treatment Recommendations*, Kompas.com cenderung menyelesaikan masalah dengan mengambil jalur hukum melalui intervensi atau campur tangan dari kepolisian sebagai pihak ketiga dalam menangani kasus kekerasan yang dialami oleh para pekerja perempuan. Hal serupa juga dilakukan oleh Konde.co, yang turut mendorong penyelesaian melalui jalur hukum. Namun, Konde.co memberikan pendekatan tambahan dengan menghadirkan pendampingan dari mitra yang mewakili suara perempuan, guna mendukung korban secara emosional, sosial, dan hukum. Dapat disimpulkan bahwa kedua media tersebut mengedepankan penyelesaian hukum, namun Konde.co menambahkan elemen pendampingan berbasis perspektif gender untuk memberikan ruang yang lebih adil bagi korban. Dalam hal ini, Konde.co lebih menonjolkan nilai berita *human interest*, karena media ini berfokus menyuarakan isu pekerja perempuan sehingga dianggap memiliki keberpihakan terhadap kelompok rentan dan lebih mudah menjangkau serta menawarkan solusi yang lebih luas terhadap kasus tersebut.

Nilai berita dalam suatu pemberitaan dapat bervariasi tergantung pada latar belakang dan kebijakan redaksional media tempat jurnalis bekerja. Seorang jurnalis yang berada di media lokal umumnya lebih menekankan pada isu-isu yang memiliki relevansi tinggi dan berdampak langsung terhadap masyarakat di sekitarnya. Selain itu, nilai berita juga dipengaruhi oleh konteks budaya dan sosial tempat media tersebut beroperasi. Dalam pemberitaan kekerasan berbasis gender, Konde.co sebagai media alternatif yang berfokus pada isu-isu keadilan gender dan kelompok rentan, cenderung menonjolkan nilai berita *human interest* yang menempatkan korban sebagai pusat perhatian, serta mengangkat aspek empati, keberpihakan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Hal ini berbeda dengan Kompas.com

yang sebagai media nasional yang menonjolkan nilai berita *proximity* yang menyoroti perlakuan pelaku sebagai kerangka informasi faktual dan perkembangan kasus. Konde.co juga lebih sering memberikan *treatment recommendation* yang bersifat advokatif, seperti mendorong perubahan kebijakan atau penguatan sistem perlindungan korban, karena media ini memiliki kedekatan emosional dan ideologis terhadap isu-isu yang diangkat, sehingga nilai berita yang ditonjolkan cenderung berakar pada kepentingan kemanusiaan dan keadilan sosial.

4.4 Pembahasan

Melalui analisis framing yang dikembangkan oleh Robert N. Entman peneliti menemukan perbedaan yang terlihat secara signifikan pada pemberitaan Kompas.com dan Konde.co yang dapat dilihat berdasarkan fokus dari kedua media tersebut. Dalam pemberitaan mengenai kasus kekerasan berbasis gender perempuan di tempat kerja, Kompas.com dan Konde.co menunjukkan pendekatan framing yang berbeda dalam *Define Problem*. Kedua media tersebut memanfaatkan judul pemberitaan sebagai elemen untuk mendefinisikan masalah. Kompas.com lebih menitikberatkan pada tindakan pelaku kekerasan, dengan fokus pada kronologi serta perlakuan yang dilakukan oleh pelaku, sementara Konde.co lebih menyoroti pengalaman dan penderitaan perempuan sebagai korban kekerasan. Hal ini sejalan dengan penelitian terdahulu yang dijelaskan oleh Dwiyanti & Putri (2023) bahwa sebagai media alternatif, Konde.co menghadirkan artikel-artikel dengan sudut pandang yang berbeda dari media *mainstream*, khususnya dalam mengangkat isu kekerasan seperti pelecehan berbasis gender terhadap buruh, serta menyampaikan aspirasi korban secara lugas dan tegas. Sedangkan, Kompas.com menyajikan pemberitaan kasus pelecehan seksual dengan penggunaan diksi yang kurang berpihak pada korban, sehingga mengaburkan fakta bahwa tindakan pelecehan benar-benar terjadi dan dialami oleh korban (Fadilah & Setiawan, 2020). Sehingga, kedua data pendukung tersebut menunjukkan keselarasan dengan hasil temuan dalam penelitian ini.

Dalam aspek *Diagnosis Causes*, Kompas.com mengaitkan terjadinya kekerasan dengan relasi kuasa, di mana laki-laki merasa memiliki dominasi yang mendorong tindakan kekerasan terhadap perempuan. Sebaliknya, Konde.co melihat akar permasalahan dari masih kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat, yang memperkuat ketimpangan gender. Hal ini sejalan dengan konsep kekerasan berbasis gender oleh Purwanti (2020) yang menjelaskan kekerasan berbasis gender muncul akibat ketimpangan relasi kuasa antara laki-laki dan perempuan, yang kemudian memperkuat subordinasi perempuan. Fenomena ini berakar pada sistem patriarki, di mana struktur sosial dan budaya yang berlaku justru membatasi hak-hak perempuan serta melanggengkan ketidakadilan gender dalam praktik sehari-hari.

Dalam *Make Moral Judgement*, Kompas.com memandang kekerasan sebagai aspek pelanggaran hukum, sementara Konde.co menekankan bahwa kekerasan terhadap perempuan adalah bentuk pelanggaran terhadap prinsip keadilan gender. Kedua media, Kompas.com dan Konde.co mencerminkan karakteristik *make moral judgements* sesuai dengan Model *Framing* menurut Robert N. Entmant yang dijelaskan oleh Sobur (2025), yaitu penilaian moral terhadap suatu peristiwa berdasarkan nilai-nilai tertentu. Kompas.com lebih menitikberatkan pada aspek hukum dan legalitas, sedangkan Konde.co menekankan pada prinsip keadilan gender.

Adapun *Treatment Recommendation*, Kompas.com cenderung mengarahkan penyelesaian kasus melalui jalur hukum formal, sedangkan Konde.co tidak hanya mengedepankan proses hukum, tetapi juga mendorong keterlibatan mitra atau lembaga pendamping yang berpihak pada perempuan dan turut mengedepankan suara korban. Dalam hal ini, Kompas.com mencerminkan prinsip penyajian informasi yang sesuai dengan karakteristik media daring nasional menurut Aulia (2020), yaitu dengan memverifikasi data melalui sumber terpercaya, menjaga objektivitas, serta bersikap kritis terhadap informasi yang belum terkonfirmasi, agar pengalaman korban terdokumentasi secara akurat dan mendapat perhatian hukum yang layak. Sedangkan, Konde.co selaras dengan karakteristik penyampaian berita yang dikemukakan oleh Yoetadi (2020), di mana media ini menerapkan pendekatan jurnalisme advokasi. Konde.co fokus mengangkat isu ketidakadilan gender dan hak-hak perempuan di berbagai bidang kehidupan melalui

sudut pandang perempuan. Media ini juga terlibat dalam pendampingan kelompok marjinal yang dapat dilihat pada artikel 5 pada situs Konde.co yang menunjukkan adanya pendampingan dari LBH APIK Jakarta untuk korban pekerja magang di Kedutaan Besar yang mengalami pelecehan seksual, serta menyediakan ruang bagi para pekerja yang menjadi korban kekerasan berbasis gender untuk menyuarakan pengalaman mereka dan berdiskusi secara terbuka. Berdasarkan penjelasan di atas media daring seperti Konde.co turut membentuk ruang publik virtual yang mempertemukan komunitas peduli isu-isu marjinal sebagai wadah berbagi, advokasi, dan solidaritas dalam memperjuangkan keadilan sosial dalam memenuhi prinsip utama dari konsep jurnalisme daring yaitu Komunitas dan Percakapan (*Community dan Conversation*) (Romli, 2018).

Jurnalisme advokasi memiliki peran penting dalam memperjuangkan kepentingan kelompok-kelompok yang terpinggirkan melalui penyampaian informasi yang berpihak pada keadilan sosial dan hak asasi manusia. Dalam konteks ini, media alternatif seperti Konde.co menunjukkan relevansi yang kuat dengan prinsip jurnalisme advokasi karena fokusnya pada isu-isu yang sering diabaikan oleh media lainnya, seperti ketimpangan gender, kekerasan berbasis identitas, dan diskriminasi struktural. Konde.co tidak hanya berperan sebagai penyampai berita, tetapi juga sebagai ruang perlawanan terhadap dominasi narasi patriarkal dan kapitalistik dalam media. Hal tersebut dijelaskan oleh Fredler dalam Nurulfadilah (2023), dalam konsep jurnalisme daring bahwa jurnalisme advokasi menempatkan jurnalis sebagai aktivis yang tidak hanya menyampaikan fakta, tetapi juga berpihak pada kelompok rentan. Dalam praktiknya, jurnalis berperan aktif mendukung perjuangan korban, seperti pada kasus kekerasan terhadap perempuan, dengan mengedepankan perspektif korban dan mendorong tercapainya keadilan. Sehingga, peran jurnalisme advokasi sejalan dengan karakteristik Konde.co sebagai media alternatif yang memiliki karakter berbeda dengan Kompas.com sebagai media nasional.

Dalam pemberitaan kasus kekerasan berbasis gender, peneliti menemukan bahwa masing-masing media telah memenuhi beberapa dari kriteria nilai berita sebagaimana dijelaskan dalam konsep nilai berita oleh Pitri (2023). Konde.co, sebagai media alternatif yang berfokus pada isu keadilan gender dan kelompok

rentan, cenderung menekankan nilai *human interest* dengan menempatkan korban sebagai pusat pemberitaan, serta menonjolkan aspek empati, keberpihakan, dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan. Berbeda halnya dengan Kompas.com yang merupakan media nasional dan lebih menitikberatkan pada nilai berita *proximity* dalam pemberitaan kasus kekerasan pekerja perempuan melalui sisi pelaku serta perkembangan kasus dari sudut pandang informatif dan faktual. Selain itu, Konde.co juga lebih sering menghadirkan *treatment recommendation* yang bersifat advokatif, seperti mendorong perubahan kebijakan dan penguatan sistem perlindungan terhadap korban. Hal ini disebabkan karena kedekatan emosional dan ideologis media tersebut terhadap isu-isu yang diangkat, sehingga nilai berita yang ditonjolkan lebih berpijak pada kepentingan kemanusiaan dan keadilan sosial.

Berdasarkan hasil temuan penelitian terhadap pemberitaan kasus kekerasan terhadap pekerja perempuan di media Kompas.com dan Konde.co, terlihat adanya perbedaan pendekatan dalam penyajian informasi dan penyikapan terhadap korban. Kompas.com cenderung menyamarkan nama korban, meskipun masih ditemukan beberapa berita yang tetap menyebutkan nama korban secara langsung. Berbeda dengan Konde.co yang secara konsisten menyamarkan identitas korban sebagai bentuk penghormatan terhadap privasi mereka. Dalam pemberitaan, Kompas.com juga lebih fokus pada penyelesaian kasus melalui jalur hukum semata, sementara Konde.co menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan tidak hanya menekankan jalur hukum, tetapi juga melibatkan pendampingan dari mitra yang mewakili suara perempuan, serta memberikan dukungan berkelanjutan pasca kasus hingga tahap pemulihan korban. Hal ini menjadi temuan menarik, karena berbanding terbalik dengan salah satu konsep berita yang dijelaskan oleh Cahya (2018) yaitu "*who*" (pelaku atau pihak terkait) tidak selalu dijelaskan secara jelas. Hal tersebut dapat dilihat pada artikel yang dibuat oleh Kompas.com yang berjudul "Pegawai Toko Roti di Cakung yang Dianiaya Anak Bos Pernah Dilempari Barang Sebelumnya" dan pemberitaan yang dibuat Konde.co dengan judul "Pekerja Magang di Kedubes Alami Pelecehan Seksual, Laporan Polisi Kasusnya Malah Dihentikan". Kedua pemberitaan tersebut, baik dari Kompas.com dan Konde.co tidak menyebutkan nama pelaku dan korban sehingga dalam melakukan analisis peneliti tidak bisa menjelaskannya secara jelas.

Dalam sisi konstruksi realitas media, setiap media daring membentuk konstruksi realitas berdasarkan latar belakang dan kepemilikannya. Kompas.com, sebagai media nasional, menyampaikan berita dengan pendekatan objektif dan berbasis fakta, berlandaskan nilai-nilai humanisme. Perspektifnya lebih menekankan pada kerangka hukum dan perkembangan kasus. Sebaliknya, Konde.co yang didirikan oleh Konde Institute, mengusung jurnalisme advokasi dengan fokus pada isu keadilan gender dan kelompok marjinal. Penyampaian beritanya lebih berpihak pada korban dan mendorong perubahan sosial. Hal ini sejalan dengan konsep konstruksi realitas media yang disampaikan oleh Peter L. Berger dan Thomas Luckman dalam Azalia (2017) yang menjelaskan bahwa kepemilikan media oleh kelompok tertentu dapat memengaruhi bagaimana suatu realitas disampaikan dalam pemberitaan. Pemilik media memiliki kontrol atas isi, sudut pandang, dan narasi yang ditampilkan, sehingga dapat membentuk cara pandang publik terhadap isu-isu sosial. Hal ini terlihat pada Konde.co yang dimiliki oleh Konde Institute, sebuah organisasi yang berfokus pada isu keadilan gender dan hak-hak kelompok marjinal. Kepemilikan ini memengaruhi cara Konde.co menyajikan berita lebih berpihak kepada korban, menonjolkan perspektif perempuan, dan mengangkat isu-isu ketimpangan struktural melalui pendekatan jurnalisme advokasi. Sehingga, nilai dan ideologi pemilik turut menentukan fokus isu yang diangkat serta cara penyampaiannya kepada publik.

